



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2017
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2017
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	07 NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Masalah RSUD Banten Akut

Kesehatan Gratis Bisa Sia-sia

SERANG - Munculnya berbagai persoalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten dinilai masuk kategori akut. Kondisi itu harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak eksekutif agar pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi fokus Pemprov Banten berjalan. Diketahui, RSUD Banten kembali diterpa persoalan,

belum usai masalah gedung baru yang mangkrak, pihak rumah sakit harus kehilangan tiga dokter spesialis sekaligus. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD milik Pemprov Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, persoalan yang berada di RSUD Banten pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak mengakibatkan

keluarnya dokter. "Masalah di RSUD Banten ini sudah akut. Kalau mereka (dokter spesialis-red) memiliki kepastian, tentu tidak akan terjadi persoalan seperti ini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (6/11).

Menurut Asep, semua persoalan itu kuncinya adalah komunikasi. Hal itu untuk menangani persoalan-

persoalan yang membuat tidak nyaman pegawai atau dokter spesialis. RSUD merupakan badan layanan umum daerah (BLUD) yang harus ditangani secara khusus. Kata dia, RSUD ini menyangkut kesehatan masyarakat banyak. "Kita meminta kepada Gubernur melalui Asda II dan Inspektorat turun mengenai manajerial RSUD," katanya.

► Ke halaman 14

Masalah RSUD...

Kata Asep, jangan sampai persoalan ini mengembang ke mana-mana yang berdampak pada perekrutan dokter-dokter. Selain itu, Ketua DPD PDIP Banten ini menegaskan, kondisi tersebut akan menjadi masalah di tengah Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan program kesehatan gratis. "Gratis juga kan jadi masalah, kalau dokternya enggak ada. Kesehatan gratis bisa sia-sia," terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menegaskan, melihat persoalan di RSUD harus dilakukan perubahan.

Menurutnya, mundurnya dokter itu bagian dari kekusutan yang harus diurai. "Rumah sakit harus diinstal ulang kalau mau benar," katanya. "Ini benang sudah terlanjur kusut, harus diurai baru ditata," tambah Fitron.

Kalau kusutnya tidak diurai dan langsung ditata, kata dia, yang ada bakal mengalami duka atau bertambah ruwet. Menurutnya, penataan RSUD harus dimulai dari *redesign* dan komitmen organisasi. "Saya kasihan ke Bu Susi (Plt Direktur RSUD Banten Susi Badrayanti-red). Harus dibantu dan dikuatkan,"

katanya. Selain itu, mundurnya tiga dokter spesialis itu indikasi ada yang *inbalance* dalam manajemen RSUD. Pelayanan publik akan terganggu jika demikian. "Kami berharap kalau hanya soal jaspel dan kemudian ada komunikasi yang baik di dalamnya, hal itu tidak akan terjadi," katanya. "Ayolah, ini ada hal yang lebih besar, yaitu, pelayanan masyarakat. Jangan soal teknis lalu masyarakat yang menjadi korban," tambah politikus

Dari hlm 13

Partai Golkar itu. Kata dia, saat ini pihaknya sedang memantapkan rekomendasi untuk rumah sakit. Menurutnya, kalau terlalu reaktif melalui kasus per kasus yang ada bukan penyelesaian, tapi pengambinghitaman. "Kami enggak mau merespons kasus per kasus. Nanti ada yang dikorbankan, kan enggak *fair* juga kalau begitu," katanya. Sebelumnya, Plt Direktur RSUD Banten Susi Badrayanti membenarkan ada

dokter spesialis yang keluar. "Ya, ada yang keluar. Yang satu alasannya karena tinggal di Tangerang," ujarnya singkat tanpa menjelaskan alasan yang lainnya. Kata dia, untuk mengantisipasi kekurangan dokter spesialis, pihaknya sedang merekrut dokter spesialis dengan program wajib kerja dokter spesialis (WKDS) dari Kementerian Kesehatan. "Kita sedang merekrut dokter spesialis dengan program WKDS," tandasnya. (fdr/air/dwi)